

Anwar Usman Sebut Ada Skenario Politisasi dan Pembunuhan Karakternya

JAKARTA (IM) - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menyebut sudah mengetahui ada upaya pembunuhan karakter terhadapnya sejak lama.

Anwar Usman menyampaikan ini untuk merespons kritik publik serta putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan bahwa dia melanggar etik berat terkait gugatan batas usia capres-cawapres yang kontroversial.

“Sesungguhnya, saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai obyek dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir, maupun tentang rencana pembentukan MKMK, telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar dalam jumpa pers, Rabu (8/11).

Ia meyakini, secepat apa pun skenario manusia tak akan mengalahkan skenario Tuhan. Ia juga kembali menyinggung bahwa jabatan merupakan milik Tuhan sehingga ia tak merasa terbebani dengan pencopotannya.

“Namun demikian, wajib bagi saya, untuk meluruskan beberapa hal, agar publik memahami, tentang apa sesungguhnya yang terjadi,” ujar Anwar.

Ia beranggapan apa yang menimpa dirinya saat ini merupakan fitnah keji. Hakim konstitusi yang dipilih oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2011 itu menyinggung riwayatnya sebagai hakim karier selama 38 tahun yang tak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial atau Badan Pengawasan MA.

Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini diketuk oleh MKMK dalam sidang pembacaan putusan etik, Selasa (7/11).

MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketekberpikahan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan.

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. ● han

115 Ribu Personel TNI AD Dikerahkan untuk Pengamanan Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 115.000 personel di seluruh Indonesia untuk mengamankan Pemilu 2024.

“Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah maparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut,” kata Agus saat memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

Setiap kodam dan kodam mempunyai rencana kontijensi dengan kerawanan-kerawanan yang akan dibuat direncanakan pascapemilu.

“Jadi sebelum, pada

saat pemilu, dan setelah pemilu itu kita rencanakan. Dan tiap-tiap kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawannya apa, biasanya kan kalau kita kerawannya alam atau non-alam,” katanya.

“Alamnya bencana alam, non-alamnya kerawanan konflik sosial. Kita sudah punya mapping setiap kodam. Satu putaran atau dua putaran, kita siap untuk mengamankan pemilu,” kata Agus.

Tidak hanya kekuatan personel, TNI AD juga mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun, sifatnya hanya sebagai perbantuan. “Ya sebenarnya alutsistanya dalam rangka untuk perbantuan kepada Polri,” ucapnya. ● mei

KPK Dapat Transaksi Keuangan Wamenkumham dari PPATK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima data hasil analisis transaksi keuangan rekening Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy dan anak buahnya.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, data transaksi itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu Ali sampaikan saat dikonfirmasi apakah betul KPK telah mengendus transaksi ganjil rekening Eddy Hiariej dan dua anak buahnya.

“Yang pasti kami sudah dapat data itu dari PPATK,” kata Ali saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ali menjelaskan bahwa KPK memang berkoordinasi dengan PPATK terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi Eddy Hiariej. Meski demikian, pihaknya tidak bisa mengungkapkan berapa nilai transaksi ganjil tersebut karena sudah masuk dalam materi penyidikan.

“Substansi tentu tidak bisa kami sampaikan karena sedang berproses,” tutur Ali. Sebelumnya, KPK menyatakan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk perkara dugaan suap dan gratifikasi Eddy Hiariej. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menerapkan pasal suap dan gratifikasi.

“Oh double, ada pasal suap ada pasal gratifikasinya,”

kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (6/11) lalu.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng teguh Santoso, terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar.

Namun, dalam perjalanannya KPK menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan kedua pihak. Meeting of mind itu menjadi latar belakang aliran dana ke Eddy Hiariej.

Laporan IPW diterima KPK pada 14 Maret lalu. Setelah diverifikasi dan ditelaah, pihak Pengaduan Masyarakat melimpahkan laporan itu ke Direktorat Penyidikan KPK. Dalam perkara itu, Eddy disebut menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy.

Sementara itu, Eddy telah menjalani klarifikasi KPK atas laporan yang dilayangkan oleh Sugeng. Eddy menilai laporan Ketua IPW itu cenderung mengarah ke fitnah.

Ditemui selepas memberikan klarifikasi di kantor lembaga antirasuah bersama dengan asisten pribadi (aspri) dan kuasa hukumnya, Eddy Hiariej membantah adanya dugaan gratifikasi Rp 7 miliar yang dilaporkan Sugeng. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PRABOWO BERI BEASISWA UNTUK MAHASISWA DARI PALESTINA

Menhan Prabowo Subianto (tengah) bersama Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (baris pertama keempat dari kiri) dan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Jonni Makroza (baris pertama keempat kanan) berfoto bersama saat serah terima calon mahasiswa dari Palestina di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima 22 mahasiswa asal Palestina yang akan disekolahkan di Universitas Pertahanan.

Presiden Jokowi : Pemilu Pesta Rakyat, Harusnya Bergembira Bukan Resah

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kerukunan dan persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan dikarenakan perbedaan pilihan.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin bahwa demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Masyarakat Indonesia telah semakin bijak dan dewasa dalam memilih sosok calon pemimpin.

“Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas. Masyarakat juga semakin bijak dalam memilih. Masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap karena pemilu adalah pesta rakyat,” kata Jokowi saat memberi sambutan pada Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Rabu (8/11).

Jokowi menekankan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat sehingga rakyat harus bergembira serta bersuka cita.

“Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita,” ujarnya.

Karena itu, Kepala Negara meminta semua pihak khususnya penyelenggara agar melakukan segala upaya untuk menjadikan pemilu sebagai ajang menghasilkan gagasan.

“Untuk itu segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan yang menghasilkan ide-ide gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa

dan negara kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkit kembali saat dirinya santap siang bersama tiga calon presiden (capres) di Istana Merdeka pada Senin (30/10) lalu. Hal tersebut merupakan gambaran sebuah demokrasi yang baik. Ketiga capres saling berkompetisi itu mau bertemu dan duduk satu meja makan bersama.

“Beberapa waktu yang lalu saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu begitu. Bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia meminta masyarakat agar tidak larut dengan perbedaan pilihan. Jangan sampai para tokoh politik sudah makan-makan bersama tapi masyarakat masih ribut-ribut usai pemilu. “Jangan

sampai yang di atas sudah makan-makan bersama yang di bawah di daerah masih ribut-ribut, ini yang perlu kita jaga bersama-sama,” katanya.

Jokowi menegaskan bahwa kerukunan dan persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan dikarenakan perbedaan pilihan.

“Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. kondusifitas bangsa tetap harus kita jaga stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama,” kata Presiden Jokowi. ● han

FOTO: ANTARA



KEANGGOTAN INDONESIA DI FATF

Menkopolkam Mahfud MD (kanan) didampingi Kepala PPATK Ivan Yustian (kiri) memberikan keterangan pers mengenai keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) di Jakarta, Rabu (8/11). Indonesia secara resmi menjadi anggota tetap ke-40 FATF pada 27 Oktober 2023 yang merupakan organisasi internasional yang berfokus memberantas korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Penyidik KPK Cecar Ahok soal Kerugian Negara Rp2,1 Triliun dalam Pengadaan LNG Pertamina

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menecerar Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok soal dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan gas alam cair/liquefied natural gas (LNG).

Ahok dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus korupsi yang diduga mengakibatkan kerugian negara Rp2,1 triliun yang menjerat eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustian.

“Dikonfirmasi pengetaahuannya terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan tersebut,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/11).

Selain itu, Ahok juga dimintai keterangan terkait awal mula rekomendasi pengadaan LNG di PT Pertamina.

Ketika ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK pada Selasa (7/11) kemarin, Ahok enggan banyak berkomentar terkait perbedaan argumen KPK dan Karen.

KPK menduga bahwa kontrak Pertamina dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, Amerika Serikat (AS) merugikan keuangan negara Rp 2,1 triliun. Sementara, Karen mengklaim kontrak tersebut justru menguntungkan perusahaan minyak negara.

“Kontraknya panjang. Makanya ini jadi bahan di sini lah, kamu tanya sama mereka

(penyidik),” ujar Ahok sembari menyinggung gedung KPK.

Dalam perkara itu, KPK menduga Karen memutuskan secara sepihak kontrak perjanjian dengan CCL LLC AS tanpa kajian analisis menyeluruh. KPK menyimpulkan tindakan Karen Agustian tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Apalagi, aksi korporasi yang dilakukan Karen ternyata tidak berjalan baik.

Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terasap di pasar domestik. Akibatnya, kargo LNG menjadi over supply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia.

Kejadian ini lantas berdampak nyata dengan menjual rugi LNG di pasar internasional oleh Pertamina. Oleh karena itu, tindakan Karen Agustian dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. ● han

FOTO: ANTARA



TNI AD GELAR APPEL PANGAMAN PEMILU 2024 DI JAKARTA

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto (tengah) memberikan keterangan pers usai mengikuti apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu dan Deklarasi Pemilu Damai di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (8/11). Apel yang juga diikuti 16 Kodam di seluruh wilayah Indonesia melalui daring tersebut untuk menyiapkan 115 ribu personel TNI AD dalam menjaga keamanan dan menjamin keberhasilan Pemilu 2024.

PENGUMUMAN

Direksi PT. F100 INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham milik Muzammil Bin Makmud, sebanyak 285 saham dan milik Muhammad Dava Al Ghifari, sebanyak 15 saham yang dilakukan oleh sehingga susunan menjadi sebagai berikut:

- Muhammad Fikro, sebanyak 285 saham;
- Subhan, sebanyak 15 saham;

Dimana rencana pengambilalihan saham tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan dan tidak mengakibatkan perubahan status hak dan kewajiban karyawan Perseroan (“Rencana Pengambilalihan”).

Dalam hal terdapat keberatan dari kreditur Perseroan terhadap Rencana Pengambilalihan, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (4) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 November 2023
PT. F100 INDONESIA
Jl. Panglima Polim No.27
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160